

**Analisis Situasi Program Model Desa Konservasi
di Desa Patanyamang Kecamatan Camba
Kabupaten Maros**

Oleh :

LAODE MUHAMMAD IQBAL

M111 08 048



**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Situasi Program Model Desa
Konservasi di Desa Patanyamang Kecamatan
Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi
Selatan

Nama : Laode Muhammad Iqbal

Stambuk : M 111 08 048

Program Studi : Kehutanan

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Abd. Rasyid Kalu, M.S
NIP.19510912198503 1 002

Prof.Dr.H. Yusran Jusuf, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19691206199603 1 004

**Ketua Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**

Dr.Ir. Beta Putranto, M.Sc
NIP. 195404181979031001

Tanggal lulus : September 2013

ABSTRAK

Laode Muhammad Iqbal (M111 08 048). Analisis Situasi Program Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dibawah bimbingan Abd.Rasyid Kalu dan Yusran Jusuf.

Kawasan Hutan Konservasi memiliki peranan penting bagi upaya pelestarian keaneka ragaman hayati, mengingat tinggi laju kepunahan spesies di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya perlu di pertahankan guna menjaga keseimbangan ekoistem. Program pemberdayaan masyarakat yang di upayakan oleh pemerintah di beberapa kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.19/Menhut-II/2004 adalah model desa konservasi. Program model desa konservasi merupakan program desa binaan untuk masyarakat di kawasan sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat melalui desa konservasi dilakukan sejak tahun 2006 oleh TN Babul di Desa Patanyamang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui situasi terkait program model desa konservasi yang dicanangkan di Desa Patanyamang dan merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan model desa konservasi di desa Patanyamang kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan acuan para pihak dalam mengembangkan model desa konservasi kedepan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2013. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner serta diskusi dengan *stakeholder* terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strengt, Weakness, Oppotunities, Thearts*).

Hasil penelitian menunjukkan situasi model desa konservasi setelah dicanangkan terdiri dari penerapan desa konservasi, aspek legalitas, aspek stakeholder, aspek pengetahuan masyarakat terhadap model desa konservasi, persepsi masyarakat terhadap model desa konservasi, aspek kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan model desa konservasi. Berdasarkan situasi model desa konservasi adapun strategi pengelolaan dan pengembangan model desa konservasi yaitu rekomendasi yang ditawarkan dan analisis SWOT. Hasil dari rekomendasi yang ditawarkan adalah aspek legalitas dan aspek kelembagaan sedangkan hasil dari analisis SWOT, maka strategi yang ditetapkan adalah strategi WT yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan, menghadapi ancaman atau merubah ancaman menjadi peluang.

Kata kunci : Kawasan Hutan, Model Desa Konservasi, Analisis SWOT, Situasi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena Taufiq dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan judul “**Analisis Situasi Program Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan**”. Dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Ir. Abd. Rasyid Kalu, M.S**, dan Bapak **Prof. Dr. Yusran Jusuf, S.Hut., M.Si.**, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran mulai dari rencana awal penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Ir. Mas’ud Junus, M.Sc.**, Bapak **Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP**, Bapak **Prof. Dr. Ir. Amran Ahmad, M.Sc.**, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran, bantuan, koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Gusti Zainal** yang telah mendedikasikan waktu dan pengetahuannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Kehutanan Bapak **Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc** dan Sekretaris Jurusan Bapak **Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si** serta Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Masyarakat Desa Patanyamang Kabupaten Maros atas kerjasamanya dalam proses pengumpulan data di lapangan.
6. **Muhammad Dahri, I Gusti Putu Bawa** dan **Irlan** yang telah banyak membantu selama penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman Angkatan 08 Kehutanan, **Sabaruddin, Dini, Adi, Ismet, Ridwan, Afif, Andi** dan teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas bantuan, perhatian, dan dukungannya selama menempuh studi di Universitas Hasanuddin.

8. Teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam, BEM Kehutanan Sylva Indonesia (PC.) UNHAS, dan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat Unhas atas kerjasamanya selama ini.
9. Adinda **Rezky Pratiwi Saleh** untuk waktu, doa, dan motivasinya selama ini.

Terlebih khusus penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Laode Tuda** dan Ibunda **Ahnat Rusiman Tawid** atas doa, kasih sayang dan jerih payahnya dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan penulis, serta adikku **Abdul Haris Ode** dan **Laode Muhammad Asro**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik dalam hal isi hingga penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis berharap kiranya penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik yang membacanya maupun yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan dan Pengelolaan Hutan.....	4
B. Taman Nasional	6
C. Pendekatan Kolaboratif.....	7
D. Desa Konservasi.....	9
E. Analisis SWOT	11
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	14
B. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data	14
C. Analisis Data	14
D. Defenisi Operasional	15

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Kondisi Fisik Lokasi	17
1. Letak dan Luas	17
2. Iklim	17
3. Tanah dan Topografi Desa.....	17
4. Penggunaan Lahan	18
B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya	18
1. Sarana dan Prasarana	19
2. Lembaga Tingkat Desa	21
3. Jumlah Penduduk	22
4. Pendidikan	23
5. Ekonomi.....	23
6. Sosial dan Budaya.....	26
7. Keanekaragaman Hayati	27

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Situasi Model Desa Konservasi	25
1. Penerapan Model Desa Konservasi.....	29
2. Aspek Legalitas	30
3. Aspek Stakeholder	32
4. Pengetahuan Masyarakat terhadap Model Desa Konservasi ..	33
5. Persepsi Masyarakat terhadap Model Desa Konservasi.....	34
6. Aspek Kelembagaan.....	36
7. Pelaksanaan Kegiatan Model Desa Konservasi	37
B. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Model Desa Konservasi	43
1. Rekomendasi yang ditawarkan	43
2. Analisis SWOT	46

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Matriks SWOT	15
2.	Tanah Guna Lahan Desa Patanyamang	18
3.	Sarana dan Prasarana Umum Desa Patanyamang	19
4.	Jumlah Penduduk Desa Patanyamang	23
5.	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Patanyamang	23
6.	Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan Desa Patanyamang	24
7.	Kepemilikan Hewan Ternak Penduduk Desa Patanyamang	24
8.	Jenis Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Patanyamang	25
9.	Jenis-Jenis Bambu yang ada di Desa Patanyamang	27
10.	Beberapa Potensi Keanekaragaman Hayati d Desa Patanyamang	28
11.	Pengetahuan dan Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Model Desa Konservasi	34
12.	Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Model Desa Konservasi Di Desa Patanyamang	36
13.	Kegiatan Yang di Laksanakan Untuk Menunjang Program Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang	38

14. Rekomendasi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Model Desa	
Konservasi	43
15. Matriks Analisis SWOT	48

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1. Quotioner	55
2. Dokumentasi Penelitian	57
3. Permenhut No: P.19/Menhut-II/2004	60

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan konservasi berfungsi sebagai perlindungan keanekaragaman satwa, tumbuhan beserta ekosistemnya. Kawasan tersebut memiliki peranan penting bagi upaya pelestarian keanekaragaman hayati, mengingat tingginya laju kepunahan spesies di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, menyebabkan keberadaan kawasan konservasi mengalami ancaman yang serius. Salah satu yang menjadi ancaman kawasan tersebut adalah keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang melakukan berbagai macam aktivitas yang bertentangan dengan kegiatan konservasi. Menurut Moeliono *dkk.* (2010), kawasan konservasi di Indonesia sedang mengalami kebuntuan, dimana kawasan tersebut yang dikelola pemerintah untuk kepentingan umum (*Public Good*) telah mengalami kerusakan, pengurangan luas atau diperebutkan berbagai pihak untuk kepentingan lain.

Tingginya tekanan pada kawasan konservasi menyebabkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pengelolaan hutan secara kolaboratif. Pengelolaan secara kolaboratif diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, akademisi maupun LSM sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Disamping itu, permasalahan-permasalahan yang terdapat pada kawasan konservasi dapat terselesaikan.

Program pemberdayaan masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah mulai dilaksanakan di beberapa kawasan konservasi seperti yang terdapat pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di taman nasional tersebut dilakukan melalui model desa konservasi. Program model desa konservasi merupakan program desa binaan untuk masyarakat disekitar kawasan hutan.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi sudah dilakukan sejak tahun 1993 oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional (TN) melalui pengembangan daerah penyangga. Karena hasilnya belum maksimal, maka sejak tahun 2006 pola pemberdayaan masyarakat tersebut dirubah melalui Model Desa Konservasi (MDK). Pembangunan Model Desa Konservasi merupakan upaya konkrit pemberdayaan masyarakat disekitar dan didalam kawasan konservasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan kawasan konservasi. Pembangunan Model Desa Konservasi meliputi 3 kegiatan pokok yaitu pemberdayaan masyarakat, penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi dan pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi (Siaran Pers Dephut, 2009). Dengan demikian perlu dilakukan penelitian mengenai analisis model desa konservasi yang dilaksanakan di Desa Patanyamang.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui situasi terkait program model desa konservasi yang di canangkan di Desa Patanyamang.
2. Merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan model desa konservasi di Desa Patanyamang.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan acuan para pihak dalam mengembangkan model desa konservasi ke depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan dan Pengelolaan Hutan

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi harus dipelajari dan dimengerti secara holistik (utuh), begitupula, kita perlu mempelajari hutan secara morfologik (melihat bagian-bagiannya) untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan (Arifin, 2001).

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 tentang kehutanan menyatakan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan” (Departemen kehutanan, 1999).

Kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa, Tujuan pembangunan kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan dalam pengelolaan yang terdiri atas, pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomis dan ekologis yang sama kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi. Saat sekarang telah ditetapkan bahwa pembangunan kehutanan dan perkebunan dititikberatkan pada

pemanfaatan sumber daya hutan dan kebun pada kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial secara seimbang bagi dan untuk manusia itu sendiri (Arifin, 2001).

Pengelolaan merupakan suatu usaha yang didalamnya meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang setiap fungsi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pengelolaan hutan bertujuan untuk menghasilkan suatu yang dikelola, sedangkan hutan berisi berbagai kehidupan yang saling ketergantungan (Arifin, 2001).

Pengelolaan hutan di Indonesia telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Beragam pola pengelolaan telah dicoba penerapannya. Dalam perjalanan waktu yang panjang tersebut banyak yang telah berubah dengan kondisi hutan kita. Hutan yang dulu rimbun kini semakin gundul, bahkan sebagian lainnya telah lenyap tak berbekas, tetapi ketika kita tidak menengok keberadaan saudara kita yang ada di dalam dan di sekitar hutan, ternyata mereka banyak berubah mereka tetap saja sederhana, lugu, bersahaja, dan masih sangat terbelakang. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan, sehingga secara lestari dapat menjamin penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Bakri, 2002)

B. Taman Nasional

Taman Nasional menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.

Taman Nasional (TN) dan kawasan konservasi (KK) lainnya merupakan aset umum yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Taman Nasional secara khusus ditetapkan untuk pelestarian tempat dengan perwakilan ekosistem tertentu dan melindungi jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang unik dan khas untuk daerah tertentu (Moeliono, 2010).

Menurut Arifin (2001) Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Manfaat dan fungsi zonasi antara lain sebagai berikut:

- a. Zona inti adalah zona khusus diperuntukan bagi upaya perlindungan dan pelestarian.
- b. Zona rimba adalah zona ini dapat dikunjungi dengan berbagai kegiatan rekreasi, tetapi dalam batasan tertentu.
- c. Zona pemanfaatan intensif adalah zona ini dialokasikan untuk menampung bentuk kegiatan rekreasi dan penyediaan sarana untuk pengelolaan.

Menurut Yusran *dkk* (2010) zonasi merupakan perangkat penting (*rule of the game*) dalam pengelolaan taman nasional. Penataan zonasi merupakan upaya

penataan ruang untuk optimalisasi fungsi dan peruntukan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Penataan zonasi merupakan prakondisi yang harus diprioritaskan sebelum kawasan taman nasional tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara efektif sesuai fungsinya. Penataan zona taman nasional didasarkan pada potensi dan fungsi kawasan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam kawasan taman nasional sekurang-kurangnya terdiri dari zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Penentuan zona lain pada setiap kawasan taman nasional dilakukan secara variatif sesuai potensi kawasan, kondisi kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar taman nasional.

C. Pendekatan Kolaboratif

Paradigma lama pengelolaan kawasan konservasi memang cenderung eksklusif dengan penekanan pada perlindungan system penyangga kehidupan, tanpa menyentuh aspek pemanfaatan lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Praktek pemikiran inilah menyebabkan rencana pengelolaan tidak mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang hidup disekitar kawasan taman nasional sehingga sering memicu konflik dan tekanan terhadap keberadaan taman nasional. Sedangkan paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi sangat berbeda, system pengelolaan harus terintegrasi dan mengakomodir berbagai kepentingan yang terkait, khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Sumberdaya alam di taman nasional dipandang sebagai manfaat yang nyata baik bagi masyarakat sekitar maupun pihak-pihak lain

yang terkait. Dengan paradig baru pengelolaan kawasan konservasi maka akan melibatkan partisipasi aktif berbagai stakeholder (Yusran *dkk*, 2010).

Pembentukan pengelolaan kolaboratif dapat dimulai dari proses-proses kooperasi, kemitraan, dan akhirnya kolaborasi. Untuk mencapai kesetaraan dalam kolaborasi diperlukan waktu yang sangat panjang, dan jika telah tercapai kolaborasi, maka diharapkan pada tahapan ini peranan pemerintah sebagai otoritas tunggal kawasan taman nasional diharapkan berkurang, karena kekuasaan dipegang para pemangku kepentingan yang secara bersama-sama selalu belajar untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Memang pengelolaan kolaboratif dicirikan oleh pembagian wewenang secara adil, akuntabilitas, dan transparan (Anshari, 2006).

Resolusi World Conservation Union 1.42 Tahun 1996 menjelaskan gagasan kolaboratif (juga disebut *co management*, *joint*, *participatory*, atau *multi stakeholder management*) adalah kemitraan antar pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumberdaya, lembaga non-pemerintah dan kelompok yang berkepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumberdaya (IUCN, 1997 *dalam* PHKA-Dephut NRM/EPIQ WWF Wallacea TNC, 2002).

Pengelolaan Taman Nasional secara kolaboratif tidak lagi bertumpu pada satu pemangku kepentingan tetapi menyebar dalam kelompok-kelompok

pemangku kepentingan yang telah dapat mengatur dirinya sendiri menurut wewenang, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing. Secara ideal, para pemangku kepentingan secara sadar menjalankan wewenangnya, peran dan fungsi, serta bertanggung jawab secara publik atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Proses belajar dalam pengelolaan kolaboratif akan membantu para pemangku kepentingan untuk menciptakan rencana-rencana kegiatan yang adaptif. (Anshari, 2006).

D. Desa Konservasi

Model Desa Konservasi (MDK) merupakan desa yang dijadikan model dalam upaya memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. (Yudista, 2010). Desa Konservasi yang dikembangkan merupakan model pengelolaan desa yang menselaraskan upaya pelestarian lingkungan dengan usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa. Model Desa Konservasi penting karena selalu terjadi pertentangan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan konservasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan (Anonim, 2011).

Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses yang aman

untuk pemanfaatan kawasan, sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan (Siaran Pers Dephut, 2008).

Menurut Andriyana (2010) kriteria Model Desa konservasi adalah sebagai berikut:

- a. Desa yang letaknya di sekitar kawasan konservasi dan masyarakat berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi.
- b. Desa yang masyarakatnya mempunyai kepedulian terhadap pelestarian kawasan konservasi.
- c. Desa yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan kuat terhadap keberadaan kawasan konservasi.
- d. Desa yang mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan.
- e. Desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di sekitar kawasan konservasi.

Departemen Kehutanan (2012) mengemukakan bahwa Dasar Hukum Pembangunan Model Desa Konservasi adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.19/Menhut-II/2004 Tentang Model Desa Konservasi. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi melalui pembangunan Model Desa Konservasi, meliputi :

1. Pembangunan kawasan hutan konservasi harus tetap memperhatikan pembangunan masyarakat didalam dan sekitar hutan.
2. Pembangunan Model Desa Konservasi sebagai upaya kongkrit pemberian contoh kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat.

3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga dilakukan secara terintegrasi dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan unit management Balai Besar/Balai TN dan Balai Besar/Balai KSDA dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.
4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga dilakukan melalui optimalisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL (hasil hutan non kayu).
5. Pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya yang dilakukan melalui pembangunan desa model di sekitar kawasan hutan konservasi.
6. Pemberdayaan masyarakat harus mengarah kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan.
7. Pemberdayaan masyarakat di arahkan pada desa-desa di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan hutan konservasi dan berpotensi mengancam kelestarian kawasan.

E. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (member gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian di kelompokkan menurut

kontribusinya masing-masing. Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi, dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan dan dianalisa. Hasil analisa dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan.

Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki, maupun segala kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor internal tersebut merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Dilain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan dihadapi yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi usaha yang dilakukan. Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu :

- a. Strength (S) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program saat ini.
- b. Weakness (W) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini.
- c. Opportunity (O) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
- d. Threat (T) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Yusran (2005) mengemukakan bahwa analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal, yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Salusu (2000) menyatakan bahwa, analisis SWOT adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif-alternatif strategis dapat disusun kegagalan menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antar faktor strategi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, sambil mencari hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2013 di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

B. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Data primer yang dikumpulkan yaitu kondisi model desa konservasi, sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan, bentuk pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, faktor pendukung dan penghambat model desa konservasi dan pandangan para pihak yang terkait dan terlibat dalam program desa konservasi di Desa Patanyamang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, laporan penelitian sebelumnya, literatur, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi :

- a) Keadaan umum lokasi penelitian
- b) Sejarah kawasan
- c) Jumlah penduduk yang bermukim
- d) Data lain yang mendukung penelitian

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yang dikaji secara mendalam. Data hasil observasi di lapangan akan dianalisis untuk menemukan situasi model desa konservasi, dan selanjutnya

dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dengan matriks analisis sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks SWOT

Faktor Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Faktor Internal		
Kekuatan (S)	Strategi SO	Strategi ST
Kelemahan (W)	Strategi WO	Strategi WT

D. Defenisi Operasional.

1. Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi.
2. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan system zonasi yaitu dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
3. Zonasi adalah pembagian atau pemecahaan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
4. Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap

persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi public, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, social, ekonomi dan budaya masyarakat berupa zona inti, zona pemanfaatan, zona traditional, zona rehabilitasi, zona religi, dan zona khusus.

5. Balai Taman Nasional adalah balai yang mengelola kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
6. Masyarakat Desa Patanyamang adalah masyarakat yang bermukim di dalam Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
7. Stakeholder adalah semua pihak yang ada kaitannya dengan segala aktivitas pengelolaan hutan baik dalam kawasan maupun di luar kawasan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Para pihak (stakeholder) terdiri dari Balai Taman Nasional (BTN), Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah daerah setempat, Perguruan Tinggi (PT), serta pihak-pihak lain yang berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kawasan konservasi, serta mendapatkan manfaat dari keberadaan TN tersebut.

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas

Desa Patanyamang secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Patanyamang memiliki luas wilayah $\pm 18,60 \text{ km}^2$. Desa Patanyamang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bentengng, Kecamatan Mallawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barugae, Kecamatan Mallawa.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Birao, Kabupaten Pangkep.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pattirodeceng.

2. Iklim

Berdasarkan perhitungan data curah hujan wilayah kecamatan Camba termasuk tipe iklim B (TN. Babul, 2008). Di wilayah desa Patanyamang musim kemarau berlangsung dari bulan April sampai September dan musim penghujan berlangsung dari bulan Oktober sampai Maret dengan suhu rata-rata harian 32°C .

3. Tanah dan Topografi

Berdasarkan peta tanah tinjau, jenis tanah di Desa Patanyamang adalah jenis tanah Aluvial. Kedalaman tanah berkisar 5 – 20 meter. Kondisi topografi pada umumnya berbukit-bukit dan terjal dengan tingkat kelerengan didominasi kelas lereng.

4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Patanyamang sebagian besar diperuntukan untuk lahan pertanian, berupa sawah dan kebun kemiri sedangkan sisanya untuk pemukiman, bangunan fasilitas umum dan hutan lindung seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tanah Guna Lahan Desa Patanyamang.

No	Penggunaan lahan	Luas (Ha)
1	HutanLindung	829
2	Sawah	250
3	Tanah FasilitasUmum	1
4	Tanah Kering	292

Sumber: Potensi Desa, 2010

B.Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umum yang terdapat dalam Desa Patanyamang berfungsi untuk memudahkan masyarakat menjalani aktivitas keseharian mereka. Pertanian di desa Patanyamang didukung oleh keberadaan 4 unit irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan 3 unit air terjun. Sarana dan prasarana umum lainnya yang terdapat di desa Patanyamang yaitu sarana dan prasarana pemerintah desa, keagamaan, kesehatan, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan perhubungan. Beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Patanyamang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Umum Desa Patanyamang.

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Umum	Keterangan
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Mesjid	3 unit
3.	Mushola	1 unit
4.	Poskesdes	1 unit
5.	Posyandu	1 unit
6.	TK	1 unit
7.	SD	4 unit
8.	SMP	1 unit
9.	Turbin PLTMH	1 unit
10.	Turbin celup	1 unit
11.	Kincir Listrik	1 Unit
12.	Jalan Desa	7 km
13.	Jalan Dusun	10 km
14.	Irigasi P3A	4 unit
15.	Air terjun	3 unit

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2011-2015

Akses jalan dari ibukota kabupaten menuju jalan poros Maros – Camba (km 50) semuanya sudah beraspal. Namun, kondisi jalan desa Patanyamang sepanjang 12 km dari jalan poros Maros-Camba (km 50) sebagian besar masih pengerasan batu-batu cadas besar. Beberapa tanjakan yang berbelok sudah menggunakan pengerasan beton sepanjang 1 km berasal dari bantuan pemerintah. Masih ada jalan desa berupa jalan tanah sepanjang 2 km. Jalan desa dibuat oleh masyarakat secara gotong royong.

Sarana angkutan masyarakat desa Patanyamang adalah sepeda motor dan mobil hartop. Biaya angkutan mobil hartop per orang sekitar 25 ribu rupiah, dan sepeda motor/ojek sekitar 50 ribu rupiah. Selain itu, sewa angkut barang dagangan seperti beras per liter adalah 300 rupiah. Jarak desa ke pasar terdekat yaitu pasar

Camba sepanjang 15 Km, atau 3 km dari jalan Poros Maros-Camba (km 50) dengan waktu tempuh 40 menit sampai 1 jam dengan kendaraan bermotor.

Sampai saat ini masyarakat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Unit Pengelola Turbin (UPT) bertanggungjawab mengelola dan memelihara PLTMH tersebut yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah. Sungai Likubodo yang airnya terus mengalir sepanjang tahun membangkitkan energi listrik mikro hidro dapat menerangi 220 rumah atau 5.000 watt. Listrik berfungsi selama 16 jam/hari (pukul 16.00 wita s/d 08.00 wita).

Selain PLTMH dan pengairan sawah, sungai Likubodo juga menjadi sumber air bersih bagi masyarakat desa Patanyamang. Prasarana air bersih berupa 1 unit sumur pompa, 12 unit mata air dan 12 unit perpipaan. Untuk sarana komunikasi, masyarakat desa Patanyamang menggunakan sarana telepon genggam atau handphone. Untuk menerima signal dari operator seluler, masyarakat harus ke lokasi tertentu yang bisa menerima signal. Untuk memperoleh informasi masyarakat menggunakan sarana media elektronik, yaitu televisi dan radio.

2. Lembaga tingkat Desa

Lembaga yang ada di desa Patanyamang yaitu:

- a. Pemerintah Desa meliputi kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa Patanyamang sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa membawahi 3 dusun, yaitu dusun Lalebata, dusun Mangngai dan dusun Bontotangnga. Jumlah aparat pemerintah desa sebanyak 9 orang.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Patanyamang. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Anggota BPD yang berjumlah 7 orang adalah wakil dari masyarakat desa Patanyamang yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- c. Dewan Adat adalah organisasi kemasyarakatan adat desa patanyamang yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat. Peranya adalah membantu pemerintah desa Patanyamang dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa Patanyamang dalam pembangunan yang berfungsi membantu kepala desa Patanyamang. Jumlah anggota LKMD sebanyak 11 orang.
- e. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun desa Patanyamang yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang berjumlah 412 KK. Kelompok tani di Patanyamang yang telah terbentuk

berdasarkan Surat Keputusan Bupati berjumlah 3 kelompok tani, yaitu *Matras* (Maju Tani Sejahtera), *Mekar Baru*, dan *Mangngai*. Selain itu terdapat 4 kelompok tani lainnya, yaitu *Sawedatu*, *Mattiro deceng*, *Bonto tangnga* dan *Sipa kaininge*.

- f. Majelis Taklim adalah lembaga dakwah dan wadah pembinaan masyarakat desa Patanyamang yang seluruhnya menganut agama Islam. Majelis Taklim yang dibentuk bernama Majelis *Babunnaiem*. Pengajian diadakan rutin sekali dalam seminggu.
- g. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK desa Patanyamang seperti pengajian dan arisan.
- h. Kelompok Simpan Pinjam dibentuk untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Patanyamang. Kelompok simpan pinjam ini beranggotakan sebanyak 258 orang. Sampai saat ini lembaga perekonomian berupa koperasi belum terbentuk.

3. Jumlah Penduduk

Desa Patanyamang mempunyai jumlah penduduk 1.491 jiwa (736 laki-laki dan 755 perempuan). Dari 341 kepala keluarga (KK) terdapat sebanyak 219 KK termasuk dalam Rumah Tangga Miskin (RTM). Penduduk ini tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan rincian sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Patanyamang.

Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
	L	P	Total
Dusun Lalebata	293	304	597
Dusun Mangngai	226	229	455
Dusun Bontotangga	217	222	439
Jumlah jiwa keseluruhan			1.491

Sumber : RPJMDES 2011-2015

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk desa Patanyamang dikelompokkan ke dalam enam jenis, yakni tidak tamat SD, SD, SMP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Penduduk desa patanyamang paling banyak tergolong dalam kelompok tidak tamat SD sebanyak 462 jiwa. Kelompok penduduk yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan terakhir sarjana sebanyak 10 jiwa. Meskipun banyak penduduk yang tidak tamat SD, penduduk desa patanyamang umumnya telah menyadari arti penting belajar, membaca dan menulis. Keterangan selengkapnya mengenai kategori penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Patanyamang (jiwa).

Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SD	462
SD	230
SMP	72
SLTA	94
Diploma	23
Sarjana	10

Sumber : RPJMDES 2011-2015

5. Ekonomi

Patanyamang merupakan desa pertanian. Mayoritas penduduk desa yaitu sebagai petani sebanyak 469 jiwa dan sisanya sebagai pedagang, Pegawai Negeri

Sipil (PNS), veteran dan pegawai swasta. Jenis mata pencaharian penduduk lainnya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Patanyamang (jiwa).

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	469
Pedagang	9
PNS	8
Veteran	18
Pegawai Swasta	27

Sumber : RPJMDES 2011-2015

Komoditas hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung dan kacang Tanah. Selain tanaman pangan, beberapa petani juga memiliki lahan yang ditanami komoditas kehutanan (jati, mahoni, gmelina, kemiri) dan komoditas perkebunan (kakao, kopi, cengkeh).

Pola peternakan sapi, kerbau dan kuda masih menggunakan sistem lepas pada lahan-lahan pengembalaan seluas 10 hektar. Ternak dilepas/digembalakan pada pagi sampai sore hari dan malam harinya dikandangkan. Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk desa Patanyamang seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Kepemilikan Hewan Ternak Penduduk Desa Patanyamang (ekor).

Jenis Hewan Peliharaan	Jumlah
Ayam	1687
Sapi	282
Kerbau	9
Kuda	81

Sumber : RPJMDES 2011-2015

Kerajinan berpotensi untuk dikembangkan sebagai lapangan kerja baru bagi penduduk desa Patanyamang sebagai home industri. Kerajinan yang sudah ada di desa Patanyamang seperti bakul, sapu ijuk dan tikar. Di desa Patanyamang sampai saat ini belum ada kelompok pengrajin. Beberapa jenis kegiatan

peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah secara rinci disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Patanyamang.

No.	Kegiatan	Manfaat/Hasil	Penggerak	Tahun
1.	Penetapan Desa Model/Kampung Konservasi	Pengembangan usaha lokal dan kesadaran konservasi masyarakat sekitar.	BKSDA SS.I	2005
2.	Peserta Pelatihan Pembuatan Cindera Mata	Pengembangan potensi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	BKSDA SS.I	2005
3.	Peserta Pelatihan Pemandu wisata	Masyarakat menjadi pemandu wisata lokal.	BKSDA SS.I	2006
4.	Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan	Kelompok yang terbentuk sebagai wadah di suatu desa yang nantinya sebagai pusat informasi tentang kehutanan kepada masyarakat sekitar.	Pusbinluh melalui BTN Babul	2007
5.	Model Desa Konservasi	Pemberdayaan masyarakat: Budidaya bambu, pelatihan konstruksi dari bambu, pembuatan pestisida nabati dan pupuk cair <i>Lactobacillus</i> , budidaya ikan lele dumbo dan membangun degester biogas dari kotoran sapi.	BTN. Babul bekerjasama dengan LSM	2011
6.	PNPM PLTMH	Kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi.	Pemerintah pusat	2004
7.	Bangunan sekolah TK	Kebutuhan pendidikan terpenuhi.	Pemerintah	2005
8.	Polindes	Kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi.	Pemerintah	2006
9.	Pengerasan jalan	Peningkatan	Pemerintah	2008

		aksesibilitas.		
10.	Pembangunan gedung SLTP	Kebutuhan pendidikan terpenuhi.	Australia Basic Education Project	2008
11.	Pembangunan gedung SD Bontotangnga dan Lale'bata	Kebutuhan pendidikan terpenuhi.	Pemda dan pemerintah Provinsi	2008 dan 2009

6. Sosial dan Budaya

Kondisi desa yang relatif masih terpencil dan kecilnya kuantitas jumlah masyarakat, justru membuat intensitas dan kualitas hubungan emosional antar masyarakat menjadi sangat erat. Kehidupan bergotong royong di desa ini selalu mewarnai aktivitas hidup mereka sehari-hari. Ada beberapa acara adat yang masih biasa berlangsung, yaitu *Mappadendang* dan *Tudang Sipulung*.

Masyarakat dan pemerintah desa Patangnyamang yang sudah memiliki kesadaran pentingnya fungsi hutan, sehingga mereka cenderung ikut aktif menjaga kawasan TN. Babul. Hal ini terlihat dari tindakan mereka melakukan pelarangan dan perusakan pipa-pipa air yang mengalihkan aliran sungai, melarang warga desa lain mengambil tanaman anggrek macan (*Phalaenopsis amboinensis*) dan lainnya yang dapat merusak ekosistem hutan.

Kesadaran lingkungan masyarakat juga terlihat pada saat acara *Tudang Sipulung* atau *Songka Bala* yang diadakan dua kali setahun pada saat akan menggarap lahan sawah. Mereka membahas upaya pengurangan penebangan pohon untuk pagar pembibitan dan kebun-kebun dari hama sapi dan babi hutan. Masyarakat sepakat untuk tidak meliarkan ternak sapi ketika musim tanam tiba,

dan pagar sebaiknya menggunakan pohon hidup atau yang dapat tumbuh ketika ditanamkan ke tanah seperti pohon gamal (*Gliricidia sepium*).

7. Keanekaragaman Hayati

Potensi keanekaragaman hayati yang ada di desa Patanyamang belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, misalnya bambu belum dilihat sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena selama ini bambu hanya digunakan sebagai kandang ayam, pagar rumah, tangga untuk memanjat aren, dan jemuran. Melalui program Model Desa Konservasi Tahun 2011 oleh Balai TN. Babul bekerjasama dengan LSM, upaya pelestarian dan budidaya bambu dijadikan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat menjadikan bambu sebagai bahan baku utama baik untuk bangunan, furniture atau perabot rumah tangga, maupun kerajinan. Jenis-jenis bambu yang ada di desa Patanyamang selengkapnya pada Tabel 8.

Tabel 8. Jenis-Jenis Bambu yang Ada di Desa Patangnyamang.

Jenis	Latin	Lokal	Kegunaan
Tali/apus	<i>Gigantochloa Apus</i>	Bulo Katala/ Nana	Kerajinan anyaman dan alat musik. Obat: radang usus
Betung	<i>Dendrocalamus Asper</i>	Pattung	saluran air, penampung air aren yang disadap, dinding rumah yang dianyam, (gedek atau bilik) dan tiang bangunan
Ater	<i>Gigantochloa Atter</i>	Parring	rumah, pagar, alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan, alat musik. Obat: Air rebusan untuk kebugaran.
Talang	<i>Schizostachyum Brachycladum</i>	Tallang	atap, dinding, lantai, rakit, tempat air, dan bahan kerajinan tangan

Perling	<i>Schizostachyum Zollingeri</i>	Karisa	dinding, tali, tirai, dan alat memancing. Untuk membuat suling
---------	----------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------

Sumber: Desa Konservasi Hidup Menyatu dengan Alam, Balai TN. Babul, 2012

Beberapa potensi keanekaragaman hayati lainnya yang terdapat di desa Patanyamang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Beberapa Potensi Keanekaragaman Hayati di Desa Patanyamang.

Jenis	Nama Latin	Bagian tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat
Jambu biji	<i>Psidium guayava</i>	Buah
Coppeng	<i>Syzygium cumini</i>	Buah
Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Buah
Mangga	<i>Mangifera sp.</i>	Buah
Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Buah, daun, batang/kayu
Kapuk	<i>Ceiba pentandra</i>	Buah
Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Buah
Salak	<i>Salacca zalacca</i>	Buah
Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>	Buah
Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Buah
Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Buah
Kedondong	<i>Spondias pinnata</i>	Daun, buah
Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	Daun, batang/kayu
Jati	<i>Tectona grandis</i>	Batang
Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>	Batang
Kakao	<i>Theobroma cacao</i>	Buah
Kopi	<i>Coffea arabica</i>	Buah
Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Batang/kayu

Sumber : Kantor Desa Patayamang tahun 2010.

Selain potensi keanekaragaman hayati ada di desa Patanyamang, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan di dalam kawasan TN. Babul, seperti madu lebah hutan, kayu bakar dan buah kemiri.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Situasi Model Desa Konservasi

1. Penerapan Model Desa Konservasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang berada dan atau berbatasan dengan kawasan hutan konservasi, Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN Babul), Sulawesi Selatan. Tujuan jangka pendek adalah menemukan cara mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan luar (external input) pada komoditas pertanian dan meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil pertanian terpadu dan berkelanjutan dan pengolahan hasil hutan non kayu sehingga dapat menjadi model konservasi yang akan diperkenalkan pada pemerintah desa lainnya di level kecamatan dan level kabupaten bahkan pada tingkat nasional sebagai model desa konservasi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kegiatan riset, sekolah lapang petani, dan pelatihan bagi petani yang terseleksi untuk menjadi aktor perubahan di wilayahnya dan pelatihan bagi aparat pemerintah desa.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Balai TN Babul di Desa Patanyamang yang berorientasi pada Pembangunan Desa Konservasi yang pernah diinisiasi pada tahun 2005 dan baru disetujui penganggarannya pada tahun 2011. Gagasan awalnya adalah bagaimana melakukan pendampingan pada masyarakat desa di daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan kelestarian hutan melalui sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan dengan menggunakan potensi sumber daya alam dalam

menghasilkan pupuk organik, pestisida nabati dan pengolahan hasil hutan non kayu seperti pengolahan bambu, rotan, daun pandang hutan untuk dijadikan kerajinan tangan untuk kebutuhan rumah tangga. Visi dari TN Babul yaitu “*Terwujudnya Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang Mantap, Serasi dan Seimbang dengan Dukungan Kelembagaan yang Efektif*”

2. Aspek Legalitas

Aspek legalitas Model Desa Konservasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting peranannya, dalam hal ini untuk melihat sejauh mana Model Desa Konservasi dapat diterima oleh para pihak. Aspek legalitas yang dimaksud adalah adanya kebijakan - kebijakan atau peraturan peraturan yang mengakomodir konsep Model Desa Konservasi. Kebijakan - kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sesuai dengan arah pengelolaan TN Babul, baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai TN Babul maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).

Pengertian dari Model Desa Konservasi adalah suatu konsep pengelolaan kawasan TN Babul secara kolaboratif antar para pihak yang terkait dengan dengan tujuan agar masyarakat sekitar hutan dapat hidup bersama dengan taman nasional. Dengan tujuan agar aktifitas konservasi mendapat dukungan dari masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Model Desa Konservasi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara kolaboratif. Beberapa dasar hukum atau

kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Model Desa Konservasi adalah :

1. UU Nomor 5 tahun 1990 Bab IX tentang peran serta masyarakat.
2. UU Nomor 41 tahun 1999 Bab X pasal 68-70 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.
3. UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 27 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.19/Menhut-II/2004 tentang pengelolaan kolaboratif di kawasan suaka alam dan kawasan pelesatarian alam.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390 tahun 2003 tentang ruang lingkup dan mitra kerjasama.

Di lokasi penelitian, khususnya pada tingkat kecamatan dan desa belum terdapat peraturan-peraturan yang mendukung Model Desa Konservasi, meskipun secara lisan pemerintah Kecamatan Camba dan Desa Patanyamang mendukung penuh terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan pihak Balai TN Babul, karena pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak TN Babul bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan kepada keadaan tersebut konsep Model Desa Konservasi yang akan berjalan belum disertai dengan dasar hukum yang secara khusus mendasari proses pelaksanaan Model Desa Konservasi. Landasan hukum yang mendasari program sangat penting untuk mengakomodir seluruh kegiatan agar dilaksanakan secara legal dan sesuai dengan aturan yang mengikat. Dasar hukum

yang mendasari pelaksanaan Model Desa Konservasi harus segera disusun dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam Model Desa Konservasi. Pihak yang terkait tersebut meliputi masyarakat, tokoh masyarakat, pihak TN Babul dan pemerintah (daerah, desa dan kecamatan). Pelibatan para pihak tersebut sangat penting karena konsep Model Desa Konservasi adalah pengelolaan secara kemitraan atau kolaboratif.

3. Aspek Stakeholder

Pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif dengan bentuk Model Desa Konservasi pada akhirnya akan didorong untuk menjadi suatu konsep yang seluruh prosesnya berasal dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta diharapkan memiliki kapasitas untuk bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain (pemerintahan daerah, LSM, dan Balai TN Babul).

Keberterimaan konsep Model Desa Konservasi oleh parapihak yang terlibat terutama masyarakat (sebagai objek dan subjek) sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya. Keberterimaan konsep Model Desa Konservasi dapat dilihat dari adanya dukungan dan pengetahuan masyarakat tentang Model Desa Konservasi (pengertian, tujuan, penggagasan, lokasi, dan kegiatannya), serta adanya dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam keberlanjutan Model Desa Konservasi.

Dalam proses pelaksanaan program Model Desa Konservasi banyak pihak yang terlibat didalamnya, parapihak tersebut dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya : 1). Pihak sebagai pembuat kebijakan

2). Pemanfaat lokal

3). Pemanfaat eksternal

Pihak yang berperan sebagai pembuat kebijakan adalah pihak Balai TN Babul. Pemanfaat lokal adalah masyarakat, tokoh masyarakat dan KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang merupakan hasil dari program pembinaan TN Babul. Pihak utama yang berperan dalam proses pelaksanaan Model Desa Konservasi adalah masyarakat, sedangkan Balai TN Babul, Pemda, dan LSM berperan sebagai pendukung dan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh ini, yaitu masyarakat mendapat dukungan penuh dari parapihak untuk melakukan penguatan kelembagaan serta dapat mengembangkan program model desa konservasi yang telah direncanakan tersebut.

4. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Model Desa Konservasi

Pengetahuan masyarakat tentang Model Desa Konservasi meliputi pengetahuan tentang pemahaman dari konsep dan program, lamanya program yang sudah berlangsung, kegiatan - kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan serta keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara *random sampling* dengan 30 responden dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat (60,0%) hanya sebatas mengetahui adanya program Model Desa Konservasi di wilayah tempat tinggalnya namun belum mengetahui benar mengenai pengertian maupun konsep dari Model Desa Konservasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya proses sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga yang mengetahui informasi model desa

konservasi hanya terbatas pada tokoh masyarakat saja. Terkait dengan lamanya waktu pelaksanaan, lebih dari setengah responden menyatakan mengetahui lama waktu dari pelaksanaan program Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang (56,6 %). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan tokoh masyarakat telah berjalan dengan baik dan menyeluruh.

Tabel 10. Pengetahuan dan Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Model Desa Konservasi

No	Pengetahuan dan Pandangan Masyarakat	Jumlah Responden		Persentase	
		Tahu/Ikut	Tidak tahu/ Tidak Ikut	Tahu/ Ikut	Tidak tahu/ Tidak Ikut
1	Pengetahuan tentang Model Desa Konservasi	18	12	60,0	40,0
2	Lama waktu Model Desa Konservasi	17	13	56,6	43,3
3	Pengetahuan tentang kegiatan Model Desa Konservasi	14	16	43,3	56,6
4	Keikutsertaan dalam kegiatan Model Desa Konservasi	10	20	33,3	66,6

5. Persepsi Masyarakat Terhadap Model Desa Konservasi

Persepsi masyarakat terhadap program Model Desa Konservasi meliputi manfaat yang dirasakan serta dukungan dan sikap (ketergangguan) terhadap pelaksanaan Model Desa Konservasi. Persepsi dan sikap masyarakat ini dapat menunjukkan seberapa besar masyarakat menerima konsep Model Desa Konservasi. Setelah diberikan pemahaman mengenai program-program Model Desa Konservasi pada saat wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa apabila program desa model ini terus dikembangkan akan memberikan

manfaat yang besar bagi kehidupannya (60,0%), karena pada dasarnya program-program Model Desa Konservasi yang akan dilaksanakan ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sedangkan sebagian lainnya menyatakan masih belum yakin terhadap manfaat dari keberlanjutan program Model Desa Konservasi (40 %), dengan alasan bahwa kegiatan Model Desa Konservasi yang sudah dilaksanakan masih belum optimal dan tidak melibatkan seluruh masyarakat. Walaupun demikian, lebih dari setengah responden menyatakan mendukung penuh keberlanjutan program desa model tersebut (66,67%), mengingat akan pentingnya dan besarnya manfaat yang akan dihasilkan dari pelaksanaan program ini terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas (intensitas) komunikasi antara petugas lapangan dengan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa peran petugas lapangan sangat tinggi terutama dalam hal sebagai pendamping yang dapat menjembatani aspirasi masyarakat desa dengan pembuat kebijakan dalam proses pengembangan Model Desa Konservasi. Belum optimalnya peran petugas lapangan di Desa Patanyamang berdampak terhadap belum menyeluruhnya informasi yang diterima oleh masyarakat, kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses kelancaran pelaksanaan Model Desa Konservasi.

Dalam proses pelaksanaan program ini, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak terganggu dengan adanya program Model Desa Konservasi (56,67 %) selama pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu aktifitas

utama mereka sebagai petani. Pertemuan-pertemuan antara masyarakat dengan tokoh masyarakat pada umumnya dilakukan secara non formal misalnya pada saat setelah melakukan ibadah shalat di masjid, karena pada dasarnya hampir seluruh masyarakat desa memeluk agama Islam sehingga lebih memudahkan di dalam proses pertemuan. Dari seluruh kondisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap sikap dan persepsi masyarakat di Desa Patanyamang dikategorikan baik, karena sebagian besar masyarakat mendukung penuh terhadap keberlanjutan pelaksanaan program terbukti dengan cukup banyaknya masyarakat yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan Model Desa Konservasi.

Tabel 11. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang

No	Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Model Desa Konservasi	Jumlah Responden		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Adanya manfaat Model Desa Konservasi	18	12	60,0	40,0
2	Model Desa Konservasi terus dilaksanakan	20	10	66,7	33,3
3	Terganggu oleh Model Desa Konservasi	13	17	43,3	56,67

6. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi.

Kelembagaan yang dapat mendukung Model Desa Konservasi adalah kelembagaan yang didalamnya dapat terjalin dengan baik antar parapihak yang terlibat. Peran parapihak dalam Model Desa Konservasi sudah jelas yaitu masyarakat yang menjalankan Model Desa Konservasi dengan kelembagaan yang sudah ada, kemudian parapihak lain sebagai pendukung pelaksanaan konsep. Kelembagaan di Desa Patanyamang yang dapat mendukung program ini adalah kelembagaan formal berupa Pemerintahan Desa, kelompok-kelompok model desa konservasi serta kelompok tani.

Pemerintah Desa Patanyamang sebagai bentuk kelembagaan formal perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung Model Desa Konservasi di desa ini yaitu dengan mengadakan pertemuan-pertemuan desa yang membahas mengenai program-program model desa konservasi yang dapat mendukung model desa konservasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek kelembagaan di Desa Patanyamang perlu di tingkatkan, hal ini dikarenakan pada dasarnya dalam pelaksanaan program telah disusun terlebih dahulu mengenai aturan mainnya namun belum dilaksanakan secara optimal.

7. Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Model Desa Konservasi

Dalam rangka menunjang keberlanjutan program model desa konservasi diperlukan kegiatan-kegiatan untuk menambah pengetahuan masyarakat, dimana kegiatan ini di damping langsung oleh fasilitator yang di tunjuk oleh pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kegiatan yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dikembangkan oleh masyarakat tanpa ada

lagi pendampingan khusus dari fasilitator, sehingga nantinya masyarakat menjadi mandiri dan actor lokal dalam pengembangan program model desa konservasi.

Tabel 12. Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Menunjang Program Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Penanaman SRI	Untuk mengajak petani mengola pertanian dengan akal sehat dan mengembalikan sistem tanam yang sesuai dengan potensi tanaman padi sehingga dapat menghemat bibit dan air dengan hasil produksi dua kali lipat.
2	Pemanfaatan Pekarangan	Sebagai penghasil makanan tambahan, sebagai penghasil tambahan pendapatan sehari-hari, sebagai penghasil bumbu dapur dan obat-obatan tradisional, sebagai penghasil bahan bangunan, sebagai penghasil kayu bakar, dan sebagai penghasil bahan dasar kerajinan rumah tangga
3	Pelatihan Energi Alternatif	Pelatihan ini bertujuan untuk memanfaatkan kotoran ternak sapi sebagai bahan energy alternative yang dapat di gunakan untuk kebutuhan memasak
4	Pelatihan Budidaya Bambu	Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat menjadikan bambu sebagai bahan baku utama baik untuk bangunan, furniture atau perabot rumah tangga, maupun kerajinan.

1. Penanaman SRI

System of rice Intensification (SRI) adalah suatu sistem yang menjaga keseimbangan alam. SRI merupakan suatu metodologi, sesuatu yang fleksibel yang menekankan pada pentingnya potensi genetik tanaman padi. Metode ini juga merangsang aktivitas mikroorganisme, yang menguntungkan bagi tanah dan membantu tersedianya hara bagi tanaman. Maka sistim intensifikasi padi ini

memaksimalkan jumlah anakan, memaksimalkan pertumbuhan akar, dan memaksimalkan suplai makanan, air dan oksigen yang cukup pada tanaman padi.

Tanaman padi akan berproduksi tinggi saat panen bila siklus hidupnya dimulai dengan bibit muda yang dipindahtanamkan secara hati-hati dengan jarak tanam relatif lebar. Tanaman padi akan berproduksi lebih banyak bila tumbuh di tanah yang drainasenya baik dan teraerasi selama periode pertumbuhan, dan tanah sehat secara biologis dengan banyak dan beragam mikroorganisme tanah. Praktek SRI menciptakan apa yang disebut sebagai sinergi, yaitu suatu hubungan dimana penambahan suatu faktor berperan bagi penambahan faktor lainnya, dan faktor kedua juga berperan bagi faktor pertama. Sehingga metode penanaman SRI ini juga dikenal dengan Sistem Penanaman Akal Sehat.

2. Pemanfaatan Pekarangan

Pemanfaatan pekarangan di desa sebagai sumber makanan dan bahan penyedap ataupun bahan obat-obatan tradisional belum diolah secara optimal. Padahal pekarangan dapat dioptimalkan untuk menghasilkan sayur sayuran, buah-buahan, dan bahan obat-obatan. Berbagai tanaman sayuran, buah-buahan, dan obat-obatan dapat ditanam di pekarangan dalam susunan yang beraneka ragam. Hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual untuk memperoleh tambahan penghasilan. Akan tetapi, semuanya ini masih berlangsung seadanya, masih dikelola secara sederhana oleh tenaga keluarga yang kadangkadang mempunyai waktu yang sangat sedikit. Pekarangan merupakan usaha untuk menggali dan mengembangkan potensi pekarangan yang ada. Pekarangan diharapkan dapat memenuhi fungsinya, terutama sebagai penghasil

makanan bergizi tinggi sehingga pemiliknya terjamin cukup gizi dengan cara murah, mudah, dan atau berkelanjutan.

Pekarangan sebagai bagian dari lahan di sekitar rumah kita mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan kebutuhan kita. Di daerah-daerah pedesaan yang masih murni, pekarangan belum dimanfaatkan secara maksimal. Manfaat pekarangan antara lain meliputi enam hal, yaitu sebagai penghasil makanan tambahan, sebagai penghasil tambahan pendapatan sehari-hari, sebagai penghasil bumbu dapur dan obat-obatan tradisional, sebagai penghasil bahan bangunan, sebagai penghasil kayu bakar, dan sebagai penghasil bahan dasar kerajinan rumah tangga.

Fungsi pekarangan yang berkembang menjadi lebih jelas dan menonjol tersebut secara garis besar yaitu sebagai sumber tambahan penghasilan, sebagai sumber bahan kebutuhan sehari-hari, dan sebagai tempat yang dapat memberikan rasa nyaman. Fungsi pekarangan sebagai sumber tambahan penghasilan adalah berorientasi atau bertujuan ke pasar. Artinya sebagian besar hasil pekarangan dijual untuk memperoleh uang yang akan mencukupi kebutuhan hidup dan sisanya, yang biasanya bermutu rendah, dikonsumsi atau dimakan sendiri. Meskipun fungsi itu bersifat jangka panjang untuk di desa Patangnyamang, yang terpenting adalah fungsi pekarangan saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga khususnya sayur-sayuran, penyedap rasa dan obat-obatan.

Berdasarkan hasil riset konsumsi rumah tangga, warga cenderung membeli sayur-sayuran ketimbang menghasilkannya dari pekarangan mereka sendiri. Selama ini, kecendrungan warga memanfaatkan pekarangan lebih mengarah

kepada segi pemuasan kebutuhan rohani dalam bentuk keindahan, yaitu pekarangan ditanami dengan berbagai macam bunga sebagai tanaman hias. Ini mungkin tidak terlepas dari pengaruh kota karena pekarangan rumah di kota cenderung ditanami tanaman hias diatas pot bunga, sedangkan pekarangan di desa masih berupa tanah yang cukup luas untuk dijadikan kebun sayur-sayuran, penyedap rasa, dan obat - obatan.

Program intensifikasi pekarangan berhubungan dengan usaha perbaikan gizi masyarakat yang lebih menekankan pekarangan pada fungsinya sebagai sumber bahan kebutuhan sehari-hari. Artinya pekarangan lebih ditekankan sebagai lahan yang dapat ditanami tanaman bahan makanan bergizi tinggi, bahan penyedap, dan tanaman obat-obatan tradisional atau apotek hidup. Pekarangan dapat memberikan hasil kepada pemiliknya, baik untuk dikonsumsi sendiri atau bila berlebih dijual ke pasar. Pekarangan ini mempunyai fungsi produktif.

3. Pelatihan Energi Alternatif

Energi alternative yang dihasilkan dari limbah ternak disebut dengan biogas. Pelatihan ini bertujuan untuk memanfaatkan kotoran ternak sapi sebagai bahan energy alternative yang dapat di gunakan untuk kebutuhan memasak. Manfaat langsung biogas yaitu mampu menggantikan bahan bakar minyak dan gas alam (elpiji). Biogas, bagi masyarakat, terbilang baru bahkan mereka tidak percaya bahwa kotoran ternak dapat menghasilkan gas sehingga mampu menyalakan kompor untuk memasak. Bukan hanya itu, mereka juga masih ragu hasil pembakaran biogas dari kotoran ternak karena anggapan mereka makanan atau minuman dapat saja berbau. Anggapan itu selalu ditemui tim pendamping

model desa konservasi pada masyarakat, namun sosialisasi dan pembuktian dapat meyakinkan masyarakat bahwa gas yang dihasilkan sama dengan gas lainnya, yaitu mampu menghasilkan api yang panas. Setelah mengikuti pelatihan ini masyarakat dapat memperoleh manfaat dari biogas , yaitu menghasilkan gas, ikut menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi dan meningkatkan kebersihan dan kesehatan, serta penghasil pupuk organik yang bermutu.

4. Pelatihan Budidaya Bambu

Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat menjadikan bambu sebagai bahan baku utama baik untuk bangunan, furniture atau perabot rumah tangga, maupun kerajinan. Salah satu kegiatan program MDK adalah pelatihan pembuatan pupuk organik berimbang NPK (Nitrogen, Pospor dan Kalium) yang salah satu kandungan daun dan akar bambu adalah Nitrogen dan kalium). Memang, program MDK dirancang untuk melakukan kegiatan konservasi yang komprehensif. Selain pelatihan teori tentang budidaya bambu, pelatihan juga dilaksanakan diluar ruangan dengan melihat dan mengamati langsung rumpun bambu. Tujuannya agar peserta dapat mencermati materi yang diberikan. Berikut materi-materi Budidaya Bambu, yaitu:

- a. Pengenalan Tanaman Bambu
- b. Jenis-Jenis Bambu
- c. Manfaat Bambu
- d. Teknik Budidaya Bambu
- e. Panen Lestari
- f. Pemeliharaan Rumpun Bambu

Pelatihan ini juga sekaligus memberikan praktek dilapangan tentang teknik budidaya bambu dan panen lestari serta teknik pemeliharaan rumpun bambu.

B. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Model Desa Konservasi

1. Rekomendasi yang ditawarkan

Tabel 13. Rekomendasi dalam pengelolaan dan pengembangan modelo desa konservasi

No	Rekomendasi	Masalah	Solusi
1	Aspek legalitas	Belum ada aturan desa untuk menunjang program model desa konservasi	Pemerintahan Desa membuat kebijakan yang mendasari konsep model desa konservasi
2	Aspek kelembagaan	Belum ada lembaga tani khusus yang dibentuk untuk menunjang program model desa konservasi	Balai TN Babul serta Pemerintah Desa bekerja sama menyusun dan membuat kelompok tani agar implementasi model desa konservasi berjalan maksimal

Berdasarkan tabel dan situasi dari konsep Model Desa Konservasi maka dapat ditawarkan suatu bentuk rekomendasi yang diharap dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi implementasi konsep yang akan dijalankan. Rekomendasi yang ditawarkan bagi faktor keberterimaan adalah pada aspek legalitas dan aspek kelembagaan, karena kedua aspek ini dinilai masih kurang dalam mendukung konsep Model Desa Konservasi.

a. Aspek legalitas

Peraturan hukum yang mendasari dari suatu konsep atau program sangat penting untuk mengakomodir seluruh kegiatan agar dilaksanakan secara legal dan sesuai menurut aturan yang mengikat. Di Desa Patanyamang belum terdapat peraturan hukum yang mendasari implementasi konsep Model Desa Konservasi, membuat implementasi belum berjalan maksimal. Maka kebijakan yang mendasari pelaksanaan Model Desa Konservasi harus segera dibuat atau disusun. Namun dalam penyusunannya seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Model Desa Konservasi, dalam hal ini mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat baik formal maupun non formal, pihak TN Babul serta pemerintah (desa maupun pusat), dengan tujuan agar semua pihak yang memiliki kepentingan terwakili.

Pada dasarnya hal ini sejalan dengan konsep atau prinsip Model Desa Konservasi yaitu pengelolaan secara kemitraan atau kolaboratif. Terutama dengan parapihak yang sebagaimana tercantum dalam Permenhut No.19 dimana memiliki kewajiban untuk mendukung terlaksananya konsep ini secara langsung. Adanya peraturan hukum yang mendasari konsep Model Desa Konservasi ini diharapkan akan menjadikan semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan yang menjadi tugasnya, pelanggaran terhadap tanggung jawab maka dapat dikenakan hukuman, dengan begitu konsep ini diharapkan dapat berjalan secara maksimal.

b. Aspek kelembagaan

Kelembagaan yang dapat mendukung Model Desa Konservasi adalah kelembagaan yang didalamnya dapat terjalin dengan baik antar parapihak yang terlibat. Hal ini dapat terlihat dari indikator adanya kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis, pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas, serta adanya pembagian sumberdaya dan biaya yang melalui mekanisme yang jelas. Dalam implementasinya di Desa Patanyamang belum terbentuk kelembagaan yang secara khusus berfungsi untuk menjalankan program-program konsep Model Desa Konservasi. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagai pembuat kebijakan sebaiknya segera menyusun suatu bentuk kelembagaan agar proses implementasi di lapangan dapat berjalan maksimal, dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat diantaranya :

- 1). Perumusan dengan tujuan yang jelas,
- 2). Departemenisasi, yaitu untuk menyusun satuan-satuan orang yang akan disertai bidang kerja tertentu.
- 3). Pembagian kerja, yaitu perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain.
- 4). Koordinasi, manfaat koordinasi adalah dapat menghindarkan pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat, Diharapkan jika kedua aspek tersebut telah dapat dipenuhi maka konsep Model Desa Konservasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan apa yang telah disusun sebelumnya.

2. Analisis SWOT

Untuk merumuskan situasi atau implementasi program model desa konservasi di Desa Patanyamang, lebih dahulu harus dilakukan analisis lingkungan strategi yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan suatu program, sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang datangnya dari luar. Analisis tersebut diharapkan memperoleh titik temu antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada program model desa konservasi, dalam kaitannya dengan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Faktor Internal

1. Kekuatan (Strength)

- a) Terdapat aturan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan adanya sumber daya manusia yang peduli dengan program Model Desa Konservasi.
- b) Aspek stakeholder dan kelembagaan yang memadai. Hal ini berdasarkan adanya lembaga formal yaitu pemerintahan desa dan adanya kelompok tani desa yang siap menunjang pengembangan program Model Desa Konservasi.

2. Kelemahan (Weakness)

Belum ada monitoring setelah program ini di laksanakan. Harapannya adalah setelah program ini terlaksana ada pengawalan dari pihak terkait guna keberlanjutan program ini.

- a) Penguasaan pengetahuan terkait program yang di canangkan masih rendah. Salah satu faktor pendukung keberlanjutan program ini adalah kapasitas pengetahuan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menjadi aktor lokal dalam model desa konservasi.
- b) Akses jalan menuju lokasi Desa Patanyamang sebagai Model Desa Konservasi cukup susah. Jalan menuju desa belum memenuhi standar kenyamanan, jalan pengerasan yang di bangun belum sampai ke Desa Patanyamang.

b. Faktor Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

- a) Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b) UU Nomor 41 tahun 1999 bab X pasal 68-70 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan
- c) UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 27 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d) Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2004
- e) Program MDK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan.

Setelah menganalisis unsur-unsur SWOT melalui matriks analisis SWOT yang di sajikan pada tabel, maka di susun strategi yang dapat di ambil untuk lebih memaksimalkan kekuatan dan peluang serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang kemudian dari strategi-strategi yang dibuat tersebut dipilih strategi yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 14. Matriks Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 tahun 1990 bab IX tentang peran serta masyarakat 2. UU Nomor 41 tahun 1999 bab X pasal 68-70 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan 3. UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 27 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah 4. Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut- II/2004 5. Program MDK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan. 	<p style="text-align: center;">Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas berlebihan oleh warga di kawasan TN BABUL, yang dapat mempengaruhi fungsi konservasi sebagai tameng bagi keselamatan alam dari kerusakan dan pencemaran 2. Potensi keberlanjutan program tidak berjalan
	<p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat aturan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian kawasan TN BABUL dan adanya SDM yang peduli dengan program MDK 2. Aspek stakeholder dan kelembagaan yang memadai 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan masyarakat agar dapat menjadi actor local pengembangan program MDK 2. Melakukan kerja sama secara proaktif dengan para pihak yang terkait program MDK

Kelemahan (W)	Strategi WO	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada monitoring setelah program ini di laksanakan 2. Penguasaan pengetahuan terkait program yang di canangkan masih rendah 3. Akses jalan menuju lokasi Desa Patanyamang sebagai Model Desa Konservasi cukup susah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggiatkan stakeholder yang berkompeten dalam kegiatan pengembangan program MDK 2. Mentransformasikan pengetahuan secara holistik kepada masyarakat akan pentingnya program MDK 3. Membangun fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan MDK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerja sama dan komunikasi yang intens dengan stakeholder yang terkait program MDK 2. Melakukan pelatihan-pelatihan terkait program MDK 3. Mengusahakan terakomodirnya fasilitas sarana dan prasarana 4. Memberikan sanksi hukum pada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan 5. Pemerintah desa membuat aturan desa untuk menindaklanjuti program MDK

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari matriks SWOT dapat dilihat bahwa program model desa konservasi memiliki kelemahan dan menghadapi ancaman yang tidak begitu menguntungkan. Oleh sebab itu faktor kelemahan dan ancaman ini haruslah menjadi prioritas utama yang harus ditangani sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik. Dalam pengembangan dan pengelolaan program ini kedepan perlu memandang masyarakat lokal sebagai sumberdaya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subjek dan bukan sekedar objek. Strategi yang harus ditetapkan adalah strategi WT yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan, menghadapi ancaman untuk merubah ancaman menjadi peluang.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah :

- 1) Membangun kerjasama dan komunikasi yang intens dengan stakeholder terkait. Hal ini mutlak dilakukan demi tercapainya keselarasan dalam hal pengelolaan dan pengembangan program. Koordinasi dengan semua pihak harus terus dilakukan agar tidak terjadi patahan informasi yang dapat merugikan dari salah satu pihak yang juga mempunyai kepentingan yang sama.
- 2) Melakukan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan ini perlu dilakukan agar menambah kapasitas pengetahuan dan khsanah berpikir masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah masyarakat dapat menjadi aktor lokal dalam melestarikan kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- 3) Mengusahakan terakomodirnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat menunjang untuk keberlanjutan program ini.
- 4) Memberikan sanksi hukum kepada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya maupun negara.
- 5) Pemerintah desa membuat aturan desa terkait program Model Desa Konservasi untuk mengikat masyarakat sehingga program ini terus berlanjut dan tujuan yang dicanangkan dapat tercapai.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2004 tentang Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang telah memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat melalui beberapa program yang dilaksanakan seperti :
 - a. Penanaman System of rice Intensification (SRI)
 - b. Pemanfaatan Pekarangan
 - c. Pelatihan Energi Alternatif
 - d. Pelatihan Budidaya Bambu
2. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program Model Desa Konservasi diantaranya adalah :
 - a. Masih banyak masyarakat yang belum memahami akan pentingnya program ini sehingga masih perlu dilakukan pendampingan dari pihak yang terkait dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Belum adanya aturan desa untuk menindak lanjuti program ini, sehingga ada aturan yang jelas untuk mengikat masyarakat.
3. Strategi yang dapat ditempuh untuk keberlanjutan program Model Desa Konservasi di Desa Patanyamang yaitu :
 - a. Membangun kerjasama dan komunikasi yang intens dengan stakeholder terkait.
 - b. Melakukan pelatihan kepada masyarakat
 - c. Mengusahakan terakomodirnya sarana dan prasarana

- d. Memberikan sanksi hukum kepada masyarakat sesuai dengan bentuk pelanggaran, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
- e. Pemerintah desa membuat aturan desa terkait program Model Desa Konservasi untuk mengikat masyarakat sehingga program ini terus berlanjut dan tujuan yang dicanangkan dapat tercapai

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung perlu mencermati dengan seksama implementasi kebijakan terkait program Model Desa Konservasi yang dilakukan dilapangan agar tujuan diberlakukanya kebijakan tersebut tidak melenceng dari tujuan yang diharapkan.
2. Stakeholder yang terkait seperti TN BABUL, LSM, ataupun Pemerintah Desa dapat berkolaborasi untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat guna menambah kapasitas pengetahuan masyarakat untuk menunjang pengembangan program Model Desa Konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, Y. 2010. **Membangun Model Desa Konservasi**. *Homepage*, <http://yusefandriyana.blogspot.com/2010/06/membangun-modeldesakonservasi.html> [Diakses: 2 Januari 2012, pukul 20.01 Wita]
- , 2011. **Model Desa Konservasi**. *Homepage*, http://www.field.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=59&lang=id [Diakses: 2 Januari 2012, pukul 20.11 Wita]
- Arief, A.2001. **Hutan dan Kehutanan**. Kanisius, Yogyakarta.
- Bakri. 2002. **Pengembangan HKm di Sulawesi Selatan**. Perennial Hutan Kemasyarakatan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Edisi 1, 17 Maret 2002. Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2012. **Desa Konservasi Hidup Menyatu Bersama Alam**. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraug, Sulawesi Selatan.
- Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang RI No.41, **Tentang Kehutanan**. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2012. **Model Desa Konservasi**. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Jusuf, Yusran dkk. 2010. **Pendekatan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung : Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat**. RECOFTC, Makassar.
- Moeliono, Moira dkk 2010. **Meretas Kebuntuan Konsep dan Panduan Pengembangan Zona Khusus Bagi Taman Nasional di Indonesia**. CIFOR, Bogor.

PHKA-Dephut NRM/EPIQ WWF Wallacea TNC 2002. **Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Manajemen Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi NRM/EPIQ**. Jakarta.

Pusat Penyuluhan Kehutanan. 1997. **Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan**. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Salusu, J. 1996. **Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit**. Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jakarta.

Siaran Pers Dephut, Nomor: 62/PIK-1/2009. **Model Desa Konservasi (MDK) Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi**. *Homepage*, <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5107> [Diakses: 2 Januari 2012, pukul 20.01 Wita]

Siaran pers Dephut, Nomor: S.73/II/PIK-1/2008. Menteri Kehutanan **Mencanangkan Pengembangan Desa Konservasi**. *Homepage*, <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/3945> [Diakses: 2 Januari 2012, pukul 22.13 Wita]

Subyantoro, Arief. FX. Suwanto. 2007. **Metode & Teknik Penelitian Sosial**, Yogyakarta : Penerbit Andi

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**.

Yudista, A. 2010. **Model Desa Konservasi**. *Homepage*, <http://www.tnlkepulauanseribu.net/index.php?which=23> [Diakses: 3 Januari 2012, pukul 14.56 Wita]

Yusran, 2005, **Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan**, Pascasarjana, IPB, Bogor.

1. Lampiran Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Wr, Wb.

Sebelumnya saya mohon maaf bila mengganggu aktivitas bapak/ibu/saudara/i. Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Model Desa Konservasi di Desa Patannyamang. Karena pentingnya penelitian ini, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ibu/saudara/I untuk mengisi kuesioner ini, terima kasih.

A. Latar belakang responden

1. Nama :.....
2. Jenis kelamin :.....
3. Usia :.....thn
4. Pekerjaan :.....
5. Pendidikan Terakhir :.....

Lingkari jawaban yang Bapak/ibu/saudara/I pilih dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

B. Pengetahuan dan Pandangan Masyarakat terhadap Model Desa Konservasi

1. Apakah Anda mengetahui tentang Model Desa Konservasi?
A. Ya B. Tidak tahu
2. Tahukah anda berapa lama Model Desa Konservasi berjalan ?
A. Ya B. Tidak tahu
3. Apakah anda tahu tentang kegiatan-kegiatan Model Desa Konservasi?
A. Ya B. Tidak tahu
4. Apakah anda aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Model Desa Konservasi?
A. Ya B. Tidak
5. Kegiatan apa yang anda ikuti ?
A. Penanaman SRI
B. Pemanfaatan pekarangan
C. Pelatihan energy alternative
D. Pelatihan Budidaya Bambu

C. Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap Model Desa Konservasi

1. Apakah anda menerima terhadap adanya program Model Desa Konservasi?

A. Ya

B. Tidak

2. Apakah anda merasakan manfaat dari program Model Desa Konservasi?

A. Ya

B. Tidak

3. Apakah anda ingin/setuju bila Model Desa Konservasi terus dilaksanakan?

A. Ya

B. Tidak

4. Apakah anda merasa terganggu terhadap adanya program Model Desa Konservasi?

A. Ya

B. Tidak

2. Lampiran Documentasi Penelitian



Wawancara dengan Sekertaris Desa Patanyamang dan tokoh masyarakat



Jenis pohon yang mendominasi di Desa Patanyamang adalah Pohon Kemiri dan Pohon Pinus



Kondisi jalan menuju Desa Patanyamang



Pemanfaatan Pekarangan Rumah



Pemanfaatan Bambu



Penanaman System of Rice Intensification (SRI)

3. Lampiran Permenhut NOMOR : P.19/Menhut-II/2004



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.19/Menhut-II/2004

TENTANG

KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu dilakukan upaya-upaya dengan mengikutsertakan para pihak dalam pengelolaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3834);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (LN Tahun 1994 Nomor 19, TLN Nomor 3544);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pariwisata Alam (LN Tahun 1994 Nomor 25, TLN Nomor 3550);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang KSA dan KPA (LN Tahun 1998 Nomor 132, TLN Nomor 3776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

- Tumbuhan dan Satwa (LN Tahun 1999 Nomor 14, TLN Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (LN Tahun 1999 Nomor 15, TLN Nomor 3804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (LN Tahun 2002 Nomor 66, TLN Nomor 4206);
 12. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 13. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian I Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
2. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa;
3. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi KPA dan KSA, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM,